

PENDIDIKAN POLITIK KEWARGANEGARAAN

Ignatius Ismanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pelita Harapan, Karawaci – Tangerang
ignatius.ismanto@uph.edu

Abstrak

Perkembangan politik akhir-akhir ini semakin dicirikan oleh meningkatnya kecenderungan pemberitaan hoax, sikap intoleransi, serta praktek-praktek politik identitas. Kecenderungan itu sangat berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia yang majemuk serta merongrong sendi-sendi demokrasi Pancasila. Kecenderungan politik tentu bukan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Perkembangan politik tidak tidak-lah berlangsung dalam ruang politik yang hampa. Sehubungan dengan itu, pendidikan politik kewarganegaraan dipandang sangat diperlukan dalam menyikapi tantangan perubahan politik. Pendidikan politik kewarganegaraan bagi organisasi-organisasi sosial, sebagai kekuatan civil society dipandang sebagai strategi dalam penguatan demokrasi yang sehat. Pendidikan politik kewarganegaraan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tantangan perubahan politik yang melemahkan demokrasi itu. PkM (Pendidikan kepada Masyarakat) menjadi sarana bagi penyelenggaraan pendidikan politik kewarganegaraan itu. PkM tentang pendidikan politik kewarganegaraan ini diselenggarakan melalui pemberian kuliah umum serta tanya jawab. Penyelenggaraan kegiatan PkM ini diharapkan menumbuhkan kesadaran publik serta membangun sikap kritis tentang potensi ancaman yang ditimbulkan dari kecenderungan politik yang merusak demokrasi itu. PkM ini diselenggarakan pada Sekolah Tinggi Teologi (STT) “Pelita Kebenaran” -Medan, sebagai salah satu elemen dari civil society. Kegiatan pendidikan politik kewarganegaraan yang diselenggarakan pada 19 Oktober 2022 mendapat sambutan yang antusias di kalangan civitas akademik

Kata kunci: civil society, politik identitas dan masyarakat majemuk

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini diperburuk oleh menguatnya fenomena polarisasi politik yaitu pengelompokan masyarakat dalam kubu yang berseberangan secara politik. Ironisnya, polarisasi politik itu telah mengusik keharmonisan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Polarisasi politik bukan-lah fenomena yang berdiri sendiri, berbagai fenomena lainnya juga telah ikut menyertai polarisasi politik itu seiring dengan meningkatnya persaingan politik, khususnya menjelang pemilihan legislative maupun pemilihan presiden secara langsung. Salah satu aspek dari fenomena polarisasi politik yang memprihatinkan adalah menguatnya sikap intoleransi yang ditunjukkan

oleh kelompok-kelompok sosial yang saling bersaing. Sikap intoleransi ini dipandang sebagai kemunduran terhadap penghargaan serta penghormatan atas keragaman adat-istiadat, latar belakang etnis serta agama yang selama ini diperjuangkan. Selain sikap intoleransi, polarisasi politik juga diperkeruh oleh meluasnya fenomena ujaran kebencian serta intensitas pemberitaan hoax. Sikap intoleransi, ujaran kebencian serta pemberitaan hoax tidak saja menjadi lahan subur bagi berkembangnya polarisasi politik, tetapi juga telah memicu kerentanan terhadap konflik yang mengeksploitasi sentiment primordial, yaitu ikatan adat istiadat, suku, etnis, dan agama.

Polarisasi politik itu sesungguhnya tidak-lah berlangsung dalam ruang politik yang hampa. Perubahan politik sejak reformasi politik pada 1998 telah mendorong persiangan politik semakin tajam. Perubahan politik juga telah diikuti kecenderungan menguatnya populisme agama (Hadiz, 2018; Shalihin, dkk., 2022). Populisme agama merupakan varian dari populisme. Namun, populisme agama menggunakan identitas agama sebagai sarana dalam menggerakkan dukungan massa. Sehubungan dengan itu, populisme agama identik dengan politik identitas. Populisme agama merupakan strategi yang dikembangkan kalangan elit politik dalam memenangkan persaingan politik. Populisme agama menjadi instrument yang penting, terutama dalam meraih dukungan mayoritas suara dengan memobilisasi sentiment agama. Namun strategi mobilisasi dukungan politik itu telah menempatkan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam kerentanan terhadap konflik. Populisme agama merupakan salah satu factor yang mempengaruhi polarisasi politik. Polarisasi politik yang dipicu oleh populisme agama hanya akan memicu perpecahan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk serta melemahkan elemen-elemen kekuatan civil society. Civil society sesungguhnya merupakan elemen yang sangat penting bagi demokrasi. Civil society dan demokrasi merupakan dua hal yang saling melengkapi (Diamond, 2018). Bahkan bagi negara Dunia Ketiga yang telah berhasil melewati masa transisi demokrasi, kehadiran civil society sangat diperlukan dalam memperkuat proses konsolidasi. Reformasi politik Indonesia sejak berakhirnya regim otoritarian Orde Baru telah mendorong perubahan yang berarti dalam membangun demokrasi yang stabil. Namun, kualitas demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini oleh sejumlah kalangan akademik dinilai telah mengalami kemunduran (Warburton dan Aspinall, 2019). Kemunduran demokrasi Indonesia ini umumnya sering dikaitkan dengan berbagai regulasi, seperti UU Keormasan yang baru dan UU ITE (Informasi Teknologi Elektronik) yang dipandang rentan terhadap pembatasan kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat. Pembatasan terhadap kebebasan berserikat serta kebebasan berpendapat ini mempersempit ruang kebebasan publik (*public sphere*). Sementara itu, adanya ruang kebebasan publik dianggap sebagai factor yang sangat diperlukan bagi perkembangan civil society yang dinamis (*vibrant civil society*). Dengan demikian, perkembangan politik Indonesia yang dicirikan oleh menguatnya populisme agama, serta menyempitnya ruang kebebasan publik menjadi tantangan yang serius bagi civil society. Sehubungan dengan itu, memperkuat keberadaan civil society di tengah perubahan politik saat ini menjadi isu yang strategis, khususnya dalam memperkuat konsolidasi demokrasi.

Dalam menyikapi perkembangan politik yang melemahkan sendi-sendi demokrasi itu, pendidikan politik kewarganegaraan dipandang sebagai strategi dalam mendorong penguatan nilai-nilai demokrasi. Kecenderungan perkembangan politik yang kurang sehat itu tentu tidak-lah berlangsung dalam ruang politik yang hampa. Perkembangan politik yang dicirikan oleh persaingan elit-elit politik yang semakin tajam menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya polarisasi politik. Pendidikan politik kewarganegaraan dipandang sangat diperlukan dalam menyikapi tantangan perubahan politik itu. Pendidikan politik kewarganegaraan bagi organisasi-organisasi sosial dipandang sebagai strategi yang

sangat diperlukan dalam menjaga kelangsungan demokrasi. Organisasi-organisasi sosial yang merupakan kekuatan civil society berperan penting bagi perkembangan demokrasi. Pendidikan politik kewarganegaraan ini sangat berkepentingan memberikan pemahaman tentang kecenderungan perkembangan politik yang tidak sehat seiring dengan perubahan politik yang semakin kompetitif. Pendidikan politik kewarganegaraan ini diharapkan meningkatkan kesadaran yang luas bagi masyarakat tentang potensi ancaman dari aspek negative perubahan politik Indonesia dewasa ini.

STT Pelita Kebenaran, Medan-Sumatera Utara merupakan salah satu elemen dari kekuatan civil society yang dipilih sebagai tempat diselenggarakannya pendidikan politik kewarganegaraan. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis pada agama Kristen, STT Pelita Kebenaran memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong kemajuan bagi Indonesia. Penyelenggaraan PkM yang memfasilitasi pendidikan politik kewarganegaraan pada STT Pelita Kebenaran, Medan itu diharapkan ikut mendukung dan memperkuat kemajemukan masyarakat Indonesia. Di samping itu, komitmen internal STT Pelita Kebenaran menjadi aspek yang penting terhadap dukungan dan keterlibatan STT Pelita Kebenaran dalam penyelenggaraan kegiatan PkM itu. STT Pelita Harapan sebagai institusi pendidikan yang didirikan pada 2011 ini mengemban misi yang sangat mulia, yaitu: (i) membangun tenaga penuaian yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan, (ii) mempersiapkan tenaga terampil yang siap melayani dan berbuah di ladang misi maupun di gereja lokal, dunia kerja, pendidikan, pemerintahan, sesuai dengan panggilan dan karunia serta keahlian masing-masing, dan (iii) melahirkan duta Kristus dan tenaga misi yang siap ditempatkan dan diutus untuk melayani dalam negeri maupun bangsa-bangsa. STT Pelita Kebenaran yang kini memiliki 8 program studi, mulai strata 1 hingga strata 3 ini bertujuan untuk menghasilkan misionaris-misionaris yang dapat melayani ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri. Selain berbekal dasar pengetahuan teologi, misionaris-misionaris yang handal itu juga dituntut memiliki pemahaman dan kepekaan terhadap tantangan perubahan sosial. Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan kegiatan PkM dengan tema ‘Demokrasi dan Panggilan Gereja Dalam Politik’ diharapkan memperkuat harapan itu. Kegiatan PkM yang didukung oleh Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang itu akan memperluas STT Pelita Kebenaran dalam menjalin kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan.

1.2 Tujuan

PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) yang mengambil tema Penguatan Civil Society bagi Demokrasi dimaksudkan menumbuhkan kesadaran politik bagi masyarakat warga, terutama dalam memahami tantangan yang dihadapi di tengah perubahan politik dewasa ini. Gagasan dan kegiatan penyadaran politik itu sekaligus dapat dipandang sebagai bentuk pendidikan politik kewarganegaraan. Pendidikan politik kewarganegaraan bagi keanggotaan organisasi-organisasi sosial, yang merupakan pencerminan kekuatan civil society, sekaligus dipandang sebagai strategi dalam membangun kesadaran berdemokrasi. Materi pendidikan politik kewarganegaraan dalam memperkuat civil society membahas dua isu yang mendasar, yaitu (i) pengertian tentang civil society, dan (ii) kajian tentang tantangan perubahan politik di Indonesia bagi perkembangan civil society, khususnya sejak reformasi politik 1998. Kegiatan penyelenggaraan PkM pada STT Pelita Kebenaran ini diharapkan memberikan bekal pengetahuan serta mendorong kepekaan politik dalam memahami tantangan perubahan politik, terlebih di tengah tajamnya persaingan politik dewasa ini.

2. METODE

Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teologi, Pelita Kebenaran, Medan-Sumatera Utara dalam penyelenggaraan PkM, memfasilitasi pendidikan politik kewarganegaraan. Adapun dipilihnya STT Pelita Kebenaran sebagai mitra dalam kegiatan PkM itu didasarkan pertimbangan. Pertama, civitas akademika STT Pelita Kebenaran merupakan salah satu elemen dari civil society yang otonom, yang selama ini telah berperan dalam pengembangan pengetahuan. Kedua, STT Pelita Kebenaran sebagai elemen dari kekuatan civil society yang tidak berorientasi pada kekuasaan, diharapkan untuk selalu tetap bersifat konstruktif dalam mempertahankan komitmen serta memperkuat sendi-sendi kehidupan demokrasi. Menjalin kerjasama dengan STT Pelita Kebenaran dalam kegiatan PkM merupakan bentuk upaya dalam menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat.

PkM yang memfasilitasi pendidikan politik kewarganegaraan pada hakekatnya dimaksudkan untuk membangun kesadaran berdemokrasi. Kegiatan PkM itu diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar dan diskusi melibatkan sejumlah narasumber dari pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan. Seminar dan diskusi memberikan pengetahuan dasar tentang wawasan demokrasi, sikap inklusif dan toleransi. Seminar dan diskusi ini juga mengkaji menguatnya fenomena politik identitas serta radikalisme agama yang menyertai perkembangan politik Indonesia akhir-akhir ini. Pemahaman tentang wawasan dan nilai-nilai demokrasi, yaitu: sikap inclusive, pengakuan terhadap keaneka-ragaman (etnis, suku, dan agama) sebagai kekayaan bangsa, serta sikap toleransi dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik – menjadi isu yang sangat penting perkembangan demokrasi Indonesia. Seminar dan diskusi yang mengambil tema ‘Demokrasi dan Panggilan Gereja Dalam Politik’ dipandang sebagai sarana yang strategis bagi penguatan civil society. Sedangkan STT Pelita Kebenaran sebagai mitra dalam kegiatan PkM ini telah berperan besar dalam mendukung kelancaran kegiatan itu. Sebagai mitra dalam mendukung pendidikan politik kewarganegaraan, STT Pelita Kebenaran ikut terlibat dalam mendiskusikan materi-materi yang akan disampaikan dalam seminar serta mengorganisir penyelenggaraan kegiatan.

Ada berbagai cara yang telah dikembangkan untuk mengevaluasi kegiatan PkM yang utamanya ditopang melalui penyelenggaraan seminar. Pertama, dengan membuka tanya-jawab serta pandangan-pandangan dari peserta seminar. Separuh waktu dalam seminar yang dialokasikan untuk tanya jawab itu sekaligus dikembangkan menjadi sarana untuk mengevaluasi pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Kedua, dibukanya acara berbincang-bincang setelah seminar usai – juga menjadi sarana untuk mengatasi keterbatasan kegiatan seminar. Acara bincang-bincang ini sekaligus menjadi mekanisme yang dikembangkan dalam mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik kewarganegaraan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PkM dilaksanakan di kota Medan pada tanggal 19 Oktober 2022. PkM diikuti sebanyak 35 peserta dari civitas akademika (mahasiswa dan staf pengajar) Sekolah Tinggi Teologi “Pelita Kebenaran”. Acara kegiatan diselenggarakan di Gedung GBI *House of Sacrifice*, Jln. Letjend Jamin Ginting, KM 11,5 Medan-Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung Jam 16.00-18.00, dan diawali

oleh sambutan pembukaan yang disampaikan Pendeta Manna S. Tobing. Kegiatan PkM ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan seminar dan tanya-jawab. Seminar menampilkan dua pembicara yaitu: Bapak Dr. Dr. Rihard Daulay M.Th., MA dan Ignatius Ismanto, MA., dan diikuti oleh tanya-jawab.

Civil Society sebagai Organisasi Sosial

Pemaparan diawali dengan menjelaskan pengertian civil society. Apakah civil society itu? Sejumlah literatur menjelaskan bahwa konsep civil society berbeda dengan konsep ‘kelas menengah’, juga berbeda dengan konsep korporasi bisnis, maupun konsep partai politik. Pada kesempatan ini, civil society hendak dipahami sebagai fenomena kehidupan sosial atau sebagai *associanal life*. Suhubungan dengan itu, civil society merupakan organisasi sosial yang memiliki sejumlah karakteristik, yaitu: bersifat otonom (mandiri), sukarela (*voluntary*), non-profit, swasemba (*self-genaring*), mengandalkan kemampuan sendiri (*self-reliant*) dan tidak berorientasi meraih kekuasaan. Karakteristik itu-lah yang membedakan civil society dari bentuk institusi atau organisasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Mengacu pada definisi itu, civil society berbeda dengan organisasi bisnis (*business corporates*) yang pada dasarnya didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Civil society juga berbeda dengan partai politik yang pada hakekatnya dibangun untuk meraih kekuasaan.

Sebagai organisasi sosial yang bersifat otonom, keberadaan dan kelangsungan civil society relative mampu terbebas dari intervensi kekuasaan negara. Dalam pengertian yang sama, civil society sering dikatakan sebagai organisasi sosial yang keberadaannya tidak menggantungkan pada negara (*independent of state*). Civil society, karena itu, bukanlah organisasi yang dibentuk oleh negara. Pengertian *independent of state* juga tidak berarti civil society dituntut untuk mengambil sikap menentang negara. Sifat otonom juga dapat diartikan sebagai organisasi sosial yang memiliki kebebasan relative dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan keanggotaan mereka. Kebebasan organisasi sosial dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan itu sangat dipengaruhi oleh sistem politiknya. Dalam negara dengan sistem politik yang otoriter, kebebasan bagi organisasi sosial relative sulit diwujudkan. Organisasi sosial yang berkembang dalam sistem politik yang otoriter selalu menjadi subyek dari intervensi kekuasaan negara. Bahkan kehadiran mereka seringkali lebih merupakan instrument yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Sebaliknya, dalam negara dengan sistem politik yang demokratis, keberadaan organisasi sosial sangat sulit menjadi subyek dari intervensi kekuasaan negara. Keberadaan dan kelangsungan organisasi sosial itu sangat ditentukan oleh dukungan dari keanggotaan organisasi sosial dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Terkait dengan sifat otonomi itu, keanggotaan dalam civil society itu bersifat sukarela (*voluntary*), yaitu muncul dari keinginan anggota untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh sebab itu, civil society selalu menjadi kekuatan kolektif dalam menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan anggotanya. Keanggotaan civil society berkembang dari tumbuhnya kesadaran, bukan dari adanya pemaksaan atau cara-cara intimidasi. Sehubungan dengan itu pula, civil society merupakan organisasi sosial yang sangat erat berkaitan dengan komitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Apa itu nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan oleh civil society? Nilai-nilai demokrasi itu adalah penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hingga kebebasan beragama. Nilai-nilai demokrasi inilah yang ditegakkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Civil society sebagai kekuatan normatif merupakan organisasi sosial

yang menghormati norma-norma serta prinsip-prinsip: mengharagai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, bersifat inklusif, taat pada aturan hukum (*rule of law*), menekankan negosiasi dalam mengatasi perbedaan, serta menolak penggunaan cara-cara kekerasan atau-pun intimidasi. Sebagai kekuatan normative, civil society bukan lah organisasi preman, atau mafia. Organisasi sosial yang menggunakan cara-cara intimidasi atau kekerasan serta mengabaikan norma-norma penghormatan terhadap keberagaman – sesungguhnya bukan-lah civil society.

Konsolidasi Demokrasi

Kebangkitan civil society menjadi isu yang menarik dalam kajian politik, terutama sejak tumbangnya regim otoritarian Orde Baru. Salah satu aspek yang menarik dari berakhirnya regim otoritarian ini adalah melemahnya gagasan dan praktek-praktek pengendalian oleh pemerintah terhadap kepentingan yang berkembang dalam masyarakat, atau disebut *state corporatism* (korporatisme negara). *State corporatism* secara umum dapat diartikan sebagai sistem representasi kepentingan yang dikendalikan oleh negara. Berbagai jenis atau bentuk organisasi sosial yang mencerminkan kekuatan civil society telah berkembang di Indonesia. Organisasi-organisasi sosial itu dapat mengambil beragam bentuk dan nama serta bergerak di berbagai sektor, seperti: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), organisasi profesi, organisasi sosial-keagamaan, organisasi kemahasiswaan, lembaga-lembaga research dan *think tank*. Selama masa regim Orde Baru, keberadaan organisasi-organisasi sosial itu diharapkan mendukung pemerintah atau negara dalam mewujudkan kepentingan nasional. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengintervensi dan mengendalikan organisasi-organisasi sosial itu, memastikan bahwa kepentingan mereka tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Pengendalian terhadap organisasi-organisasi sosial itu ditempuh melalui cara-cara *coersive* (pemaksaan). Bila perlu, pemerintah dapat membubarkan organisasi sosial yang kepentingannya dianggap mengganggu kepentingan negara. Organisasi buruh, yaitu SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) selama masa regim otoritarian Orde Baru, misalnya, dipandang lebih merupakan organisasi korporatis yang dikendalikan oleh pemerintah. Gagasan dan praktek-praktek pengendalian kepentingan oleh negara ini telah semakin melemah sejak tuntutan terhadap Presiden Soeharto untuk mengakhiri kekuasaan serta dipertanyakannya legitimasi kelangsungan regim kekuasaan yang dibangunnya. Bahkan kebangkitan civil society itu dipandang berperan besar dalam mendorong transisi demokrasi di Indonesia (Hadiwinata, 2005).

Reformasi politik yang didukung oleh berbagai elemen kekuatan civil society itu telah membawa perubahan politik yang berarti bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Reformasi politik itu telah mengakhiri keterlibatan militer dalam politik praktis, melembagakan gagasan supremasi sipil atas militer, memperkenalkan pelembagaan mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, serta mendorong ruang kebebasan publik yang lebih terbuka. Indonesia mengalami perubahan politik yang dramatis dalam melembagakan sistem demokrasi pemilihan umum yang terbuka. Namun, perubahan politik yang dramatis itu dipandang belum mampu mendorong kemajuan demokrasi secara substansial. Perubahan politik Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah isu dan tantangan bagi terwujudnya demokrasi yang stabil. Isu dan tantangan demokrasi itu yaitu praktek-praktek korupsi yang belum bisa ditegakkan, meskipun reformasi institusi dan lembaga telah dilembagakan. Praktek-praktek penggunaan kekuatan politik uang (*money politics*) tidak juga menyusut dalam transaksi politik. Ironisnya, perkembangan politik di Indonesia semakin dicirikan oleh menguatnya kecenderungan kartelisasi politik (Ambardi, 2009) atau oligarkhi (Robinson dan Hadiz, 2006; Hadiz, 2019). Dengan

mengembangkan pendekatan ekonomi-politik, Robison dan Hadiz menilai bahwa peran oligarkhi itu telah menjadikan perubahan politik dalam mendorong demokrasi pasca reformasi menjadi kurang bermakna.

Perubahan politik yang dicirikan oleh persaingan politik yang semakin kompetitif pada saat yang sama justru memicu problematika terhadap konsep kedaulatan rakyat, dimana rakyat semakin sulit dalam memahami realitas politik. Kepercayaan publik terhadap partai politik dan parlemen semakin melemah di tengah menguatnya pengaruh institusi-institusi politik itu yang seharusnya berperan penting dalam memperkuat konsolidasi demokrasi. Ironisnya persaingan politik yang semakin terbuka itu juga diikuti oleh menguatnya fenomena populisme Islam yang memicu kontroversi dalam masyarakat luas. Populisme Islam memiliki kemiripan dengan populisme pada umumnya, yang sering dikaitkan sebagai upaya memobilisasi terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari proses pembangunan untuk melawan elit kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan dalam tulisan Shalihin dkk. (2023) bahwa populisme secara umum merupakan *“mobilization and homogenization of diverse dissatisfaction of the masses against the elite”*. Dalam pengertian itu, populisme merupakan semangat yang diperjuangkan untuk mengatasi ketidak-adilan, dan kekecewaan dari ketidak-adilan itu diarahkan pada elit penguasa. Populisme karena itu dapat menjadi gerakan yang diperjuangkan dalam mengatasi ketidak-adilan dengan sasaran utama dari sumber ketidak-adilan itu adalah elit kekuasaan. Verdi Hadiz menjelaskan populisme Islam sebagai gerakan untuk memperjuangkan ketidak-adilan yang dialami oleh “ummah”, istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah rakyat (people). Konsep ‘ummah’ digunakan untuk membangkitkan gerakan dengan menyatukan mereka yang mengalami ketidak-adilan itu, dan ketidak-adilan itu disebabkan oleh elit-elit kekuasaan yang korup. Populisme Islam menjadi konsep yang memicu kontroversi saat diperkenalkan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, yaitu terdiri dari beragam latar belakang agama. Di samping itu, ketidak-adilan dari proses pembangunan itu sesungguhnya tidak saja dialami oleh kelompok agama tertentu. Populisme Islam menyatukan beragam kelompok-kelompok Islam, namun apakah gerakan itu juga menyelesaikan persoalan ketidak-adilan? Sehubungan itu, populisme Islam di tengah persaingan politik yang tajam dapat diartikan lebih sebagai strategi untuk meraih dukungan mayoritas suara dalam pemilihan umum. Hadiz (2018) menilai bahwa populisme agama telah menjadi sarana bagi kekuatan oligarkhi dalam mempertahankan hegemoninya. Populisme agama merupakan politik identitas yang berpotensi memecah-belah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Di samping isu populisme agama, faktor lain yang berpotensi menjadi kendala bagi perkembangan civil society yaitu fenomena penyempitnya ruang kebebasan publik, atau yang secara umum dikenal dengan konsep *‘public sphere’*. Apa itu ruang kebebasan publik, dan mengapa ruang kebebasan publik merupakan isu yang penting bagi demokrasi dan civil society? Konsep ruang kebebasan publik, civil society dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa civil society dan demokrasi diibaratkan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Artinya kehadiran civil society sangat berperan bagi perkembangan demokrasi. Pada sisi yang lain, demokrasi sangat berpengaruh bagi perkembangan civil society. Secara teoritis, syarat bagi demokrasi setidaknya adanya jaminan bagi kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat. Negara yang demokratis menjamin kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat itu, yaitu melalui konstitusi yang dirumuskannya. Negara itu umumnya memiliki komitmen untuk meratifikasi konvensi internasional tentang kebebasan sipil dan politik. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi internasional itu. Kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat merupakan elemen dalam mewujudkan ruang kebebasan publik. Adanya ruang kebebasan publik dipandang sebagai faktor berpengaruh bagi perkembangan civil society yang dinamis.

Perkembangan politik dewasa ini telah menempatkan media massa sebagai platform yang berperan penting dalam menjaga ruang kebebasan publik. Sehubungan dengan itu, negara mengatur kebebasan itu secara transparan agar kebebasan itu juga tidak disalah-gunakan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi akhir-akhir ini, media massa virtual merupakan platform baru dalam menyuarakan kebebasan itu. Media massa virtualpun pada hakekatnya juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga ruang kebebasan public. Tanpa dikelola secara transparan, media massa virtual juga dapat menjadi kendala bagi terwujudnya kebebasan berpendapat, serta kebebasan berekspresi secara sehat. Fenomena penyebaran berbagai informasi hoax, serta ujaran kebencian yang berkembang akhir-akhir ini pada dasarnya dapat terjadi, salah satu faktornya karena peluang yang dibuka oleh media massa virtual, memanfaatkan kebebasan demi kebebasan. Sehubungan dengan itu, UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan. Regulasi ini merupakan revisi terhadap undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 8/2008. Ironisnya, regulasi yang diharapkan mengatur kebebasan secara sehat itu telah memicu kontroversi yang luas. Regulasi itu dipandang sebagai dasar pijakan bagi pemerintah untuk melakukan penangkapan terhadap aktivis civil society yang dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintah. Amnesty Internasional mencatat kasus kebebasan berekspresi sejak UU ITE diperkenalkan mengalami peningkatan yang tajam dari 74 kasus pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi 233 kasus pada masa pemerintahan Joko Widodo (theconversation.com, 2019). Sejumlah kalangan LSM yang merupakan elemen dari civil society menilai regulasi itu sebagai bentuk menyempitnya ruang kebebasan publik. Penyempitan ruang kebebasan itu dapat menjadi kendala bagi perkembangan civil society yang dinamis. Sehubungan dengan itu, elemen-elemen kekuatan civil society dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 19/2016 itu agar tidak semakin memperburuk terjadi kemunduran demokrasi. Di samping UU No.19/2019 tentang ITE, regulasi baru yang mengatur organisasi kemasyarakatan, yaitu UU No. 2/2017 tentang Keormasan dengan memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi sosial yang dianggap membahayakan kepentingan nasional – juga dianggap rentan dalam membatasi kebebasan berserikat. Fenomena menyempitnya ruang kebebasan publik itu, yaitu dalam kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat -dipandang sebagai salah satu faktor terhadap kemunduran demokrasi Indonesia pasca reformasi (Warburton dan Aspinall, 2019). Kemunduran demokrasi tentu merupakan kendala dalam mendorong perkembangan civil society yang dinamis.

Keseluruhan materi yang disampaikan dalam seminar itu membuka antusiasme peserta seminar dalam memahami perubahan politik sejak 1998. Hal itu tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Berbagai pertanyaan yang mereka ajukan, yaitu tentang tantangan bagi civil society dalam memperkuat demokrasi, serta isu polarisasi politik – semakin mereka pahami bahwa semua itu terjadi karena dipicu oleh persaingan politik yang tidak sehat, dalam arti menggunakan isu-isu primordial yang mereka nilai sangat rentan terhadap konflik bagi masyarakat yang majemuk. Seminar yang berlangsung singkat itu, yaitu hanya 2 jam dari 16.00-18.00 dan dilanjutkan dengan acara ramah-tamah dianggap sangat berarti bagi mitra, tidak hanya membuka cakrawala peserta dalam melihat tantangan dan perubahan politik Indonesia, tetapi juga pengalaman institusional dalam membangun kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan lainnya.



Foto Bersama civitas akademika STT Pelita Kebenaran, Medan dengan pembicara dari Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Tangerang, Dr. Richard Daulay dan Ignatius Ismanto, 19 Oktober 2022.

4. KESIMPULAN

Seminar dan diskusi dengan tema Civil Society dan Demokrasi merupakan sarana untuk mendesiminasikan serta mendiskusikan pemahaman masyarakat luas tentang civil society, sebagai elemen yang dianggap penting bagi perkembangan demokrasi. Seminar dan diskusi itu juga membahas sejumlah tantangan yang dihadapi civil society di tengah perubahan politik Indonesia. Seminar dan diskusi yang melibatkan kalangan civitas akademik Sekolah Tinggi Teologi ‘Pelita Kebenaran’ – Medan merupakan kegiatan utama dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat. Keterlibatan peserta dalam diskusi, termasuk sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh peserta sesungguhnya merupakan salah satu aspek yang menarik dalam menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya kehadiran civil society yang dinamis (*vibrant*). Kegiatan seminar dan diskusi ini sekaligus dapat dipandang sebagai bentuk pendidikan politik kewarganegaraan dalam mendukung perkembangan demokrasi yang sehat dan stabil.

Adapun materi utama dalam diskusi itu adalah tentang civil society. Disadari bahwa civil society merupakan topik kajian yang relative baru dalam perkembangan politik di Indonesia. Kajian terhadap civil society itu sesungguhnya menjadi isu yang semakin menarik seiring dengan kebangkitan civil society sejak berakhirnya regim otoritarian Orde Baru. Bahkan civil society menjadi salah satu elemen yang penting dalam mendorong transisi demokrasi. Namun, perubahan politik dalam memperkuat konsolidasi demokrasi telah membawa sejumlah tantangan bagi kelangsungan civil society yang dinamis. Tantangan civil society itu dapat dipicu dari dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal). Faktor internal yang menjadi tantangan bagi civil society, terutama terkait dengan karakteristik dan

norma yang diperjuangkan. Salah satu tantangan internal bagi civil society yaitu menjaga kemandirian, termasuk kemandirian secara finansial. Faktor internal lainnya adalah adanya kelompok-kelompok sosial yang menampilkan sosok yang ‘*uncivil*’, yaitu menggunakan cara-cara intimidasi serta cenderung memilih sikap eksklusif dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Sedangkan sejumlah faktor eksternal umumnya bersumber dari perubahan politik yang tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi dan berdampak bagi kelangsungan civil society, yaitu kecenderungan menguatnya politik identitas, serta menyempitnya ruang publik (*public sphere*), yang dikawatirkan dapat menjadi kendala dalam mengekspresikan kebebasan berserikat serta kebebasan berpendapat.

Kegiatan PkM yang diselenggarakan pada STT Pelita Kebenaran, Medan melalui seminar dan diskusi dengan tema ‘Demokrasi dan Panggilan Gereja Dalam Politik’ pada hakekatnya merupakan bentuk pendidikan politik kewarganegaraan, yaitu sebagai sarana dalam memahami dan tantangan perubahan politik Indonesia. Isu utama dari kegiatan PkM ini adalah kesinambungan kegiatan itu sendiri. Namun, sejumlah cara dapat mulai dipikirkan dalam menjaga kesinambungan, seperti: integrasi kurikulum dengan tema atau isu-isu yang berkaitan dengan politik dan demokrasi hingga kegiatan seminar berkala, tidak harus secara onsite tetapi juga secara online. Semoga kegiatan PkM tentang pendidikan politik kewarganegaraan ini dapat menjadi sarana dalam menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas terselenggaranya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berlangsung di Sekolah Tinggi Teologi – Pelita Kebenaran, pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 di Medan. Kami secara khusus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan PkM ini, yaitu:

1. Dr. Andrew P.L. Tobing, M. Hum., Ketua Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran, yang telah memfasilitasi kegiatan PkM yang melibatkan komunitas civitas akademika STT Pelita Harapan, serta peserta civitas akademika STT Pelita Kebenaran yang terlibat dalam kegiatan PkM.
2. Dr. Naniek Setijadi S.Pd., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan (FISIP-UPH) selaku penanggung jawab kegiatan PkM.
3. Dr.-Ing. Ihan Martoyo, ST, M.Sc., M.T.S., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat– UPH (LPPM-UPH); yang mendukung kegiatan PkM
4. Elfi, SE., MM, Direktur Administrasi FISIP-UPH
5. Firman Daud Lenjau Lung M.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP- UPH.

Kami menyadari penyelenggaraan PkM ini masih jauh dari sempurna, dan kami berharap kegiatan PkM ini memberikan inspirasi serta sumbangan yang berarti dalam merawat keberagaman masyarakat Indonesia

6. DAFTAR PUSTAKA

Diamond, Larry. (2018). What Civil Society Can Do to develop Democracy, diunggah dari <https://iamcitizen.africa/show/iamcitizenafrika-an-introduction/post/76/what-civil-society-can-do-to-develop-democracy>

Hadiz, Vedi. (2018). Kuasa Oligarkhi Dilanggengkan Lewat Populisme Islam, diunggah dari <https://www.balairungpress.com/2018/08/19211/>

Warburton, Eve dan Edward Aspill. (2019). “Explaining Indonesia’s Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion”. *Contemporary Southeast Asia* 41, No. 2, hal. 255–85.

Robison, Richard dan Vedi Hadiz. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.

[Shalihin](#), Nurus, M. Yusuf dan Hulwat. (2023). The Discourse of Islam in Populism Movement. *Journal of Pragmatics and Discourse Research* Vol 03 No 01, hal. 28-45